

KAPASITAS KEBIJAKAN (*POLICY CAPACITY*) PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA MALANG

Akhmad Amirudin

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: akhmadamirudin@ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga dimensi kapasitas kebijakan, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 110 responden aparatur pelaksana kebijakan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang yang dipilih dengan teknik proportionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi, dengan kapasitas operasional sebagai prediktor terkuat. Ketiga dimensi secara simultan menjelaskan 61,3% variasi keberhasilan implementasi. Temuan mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pembiayaan, kelembagaan, dan koordinasi antarorganisasi, merupakan prasyarat pencapaian target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Penelitian merekomendasikan pengembangan analisis kebijakan daerah, penguatan sistem data persampahan, dan pelembagaan forum kolaborasi multipihak.

Kata Kunci: Kapasitas Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, Kota Malang.

Abstract

This study aims to analyze the effect of three dimensions of policy capacity, namely analytical capacity, operational capacity, and political capacity, on the successful implementation of waste reduction and handling policy in Malang City. The research used a quantitative approach with an explanatory survey design. Data were collected through questionnaires from 110 respondents who are implementing officials of waste policy at the Environmental Agency, Regional Development Planning Agency, sub-districts, and urban villages in Malang City, selected through proportionate stratified random sampling. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that analytical capacity, operational capacity, and political capacity each have a positive and significant effect on implementation success, with operational capacity as the strongest predictor. The three dimensions simultaneously explain 61.3% of the variance in implementation success. The findings indicate that strengthening local government policy capacity, particularly in financing, institutional, and inter-organizational coordination aspects, is a prerequisite for achieving the 30% waste reduction and 70% waste handling targets. The study recommends developing regional policy analysts, strengthening waste data systems, and institutionalizing multi-stakeholder collaboration forums.

Keywords: Policy Capacity, Policy Implementation, Waste Management, Local Government, Malang City.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 menargetkan pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Target tersebut diturunkan ke daerah melalui Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), termasuk di Kota Malang. Namun demikian, data pengelolaan sampah nasional menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota, termasuk kota-kota besar di Jawa Timur, belum mampu mencapai target pengurangan tersebut. Kesenjangan antara target dan capaian ini kerap dijelaskan dengan keterbatasan sarana, padahal akar persoalan yang lebih mendasar terletak pada kapasitas kebijakan (policy capacity) pemerintah daerah dalam mendesain, mengoordinasikan, dan mengeksekusi kebijakan persampahan.

Secara nasional, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa timbulan sampah Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahun, dengan proporsi sampah rumah tangga sebagai penyumbang terbesar dan sampah sisa makanan serta plastik mendominasi komposisi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Pada saat yang sama, sebagian besar kabupaten/kota masih mengandalkan paradigma kumpul-angkut-buang yang menempatkan Tempat Pemrosesan Akhir sebagai tumpuan utama, sehingga umur teknis TPA terus menyusut. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengurangan dan penanganan sampah bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan persoalan implementasi kebijakan publik yang menuntut kejelasan desain, kecukupan kapasitas, dan dukungan perilaku aktor pelaksana maupun kelompok sasaran.

Urgensi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah juga bertautan dengan agenda pembangunan yang lebih luas. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan 11 mengenai kota dan permukiman berkelanjutan serta tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menempatkan pengelolaan sampah perkotaan sebagai indikator kunci keberlanjutan kota. Pergeseran paradigma menuju ekonomi sirkular menuntut pemerintah kota tidak lagi memperlakukan sampah semata sebagai residu yang harus disingkirkan, melainkan sebagai sumber daya yang dikelola sejak dari sumbernya. Dalam kerangka tersebut, kualitas implementasi kebijakan di tingkat kota menjadi penentu apakah komitmen global dan nasional benar-benar berubah menjadi praktik pengelolaan yang lestari di tingkat tapak.

Wu, Ramesh, dan Howlett (2015) mendefinisikan kapasitas kebijakan sebagai seperangkat keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan, yang terdiri atas kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik pada level individu, organisasi, dan sistem. Howlett dan Ramesh (2016) menegaskan bahwa defisit pada salah satu dimensi kapasitas menjadi titik lemah (Achilles' heel) yang menyebabkan kegagalan tata kelola. Dalam konteks persampahan Kota Malang, kapasitas analitis berkaitan dengan kemampuan mengolah data timbulan dan mengevaluasi program; kapasitas operasional berkaitan dengan pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen layanan; sedangkan kapasitas politik berkaitan dengan dukungan kepala daerah, DPRD, dan legitimasi publik. Urgensi penelitian ini adalah minimnya pengukuran empiris kapasitas kebijakan pemerintah kota dalam sektor persampahan di Indonesia.

Diskursus kapasitas dalam praktik pemerintahan daerah kerap direduksi menjadi persoalan kecukupan anggaran dan personel semata. Kerangka policy capacity menawarkan pandangan yang lebih utuh dengan membedakan jenis kompetensi (analitis, operasional, politik) dan level kapasitas (individu, organisasi, sistem), sehingga diagnosis kelemahan implementasi menjadi lebih presisi. Namun demikian, penerapan kerangka ini dalam riset empiris di Indonesia masih terbatas pada telaah konseptual dan studi kasus, tanpa pengukuran yang memungkinkan perbandingan antar dimensi kapasitas. Penelitian ini mengisi celah

tersebut dengan mengadaptasi instrumen pengukuran kapasitas kebijakan (Ramesh, Howlett & Saguin, 2016) pada konteks kebijakan persampahan pemerintah kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas analitis terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang, pengaruh kapasitas operasional terhadap keberhasilan implementasi, pengaruh kapasitas politik terhadap keberhasilan implementasi, dan pengaruh simultan ketiganya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih pemerintah untuk mengatasi persoalan publik, yang mencakup pilihan untuk bertindak maupun tidak bertindak. Dalam siklus kebijakan, implementasi menempati posisi strategis karena pada tahap inilah keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan administratif, alokasi sumber daya, dan interaksi dengan kelompok sasaran (Agustino, 2020). Studi implementasi generasi pertama menaruh perhatian pada kegagalan program-program besar dan menyimpulkan bahwa jarak antara rumusan kebijakan dan realisasi di lapangan merupakan persoalan yang sistematis, bukan insidental.

Perkembangan studi implementasi kemudian terpolarisasi ke dalam dua tradisi besar. Tradisi *top-down* menekankan kepatuhan pelaksana terhadap tujuan yang ditetapkan pembuat kebijakan, dengan variabel kunci berupa kejelasan standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, serta disposisi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). Sebaliknya, tradisi *bottom-up* menempatkan aktor pelaksana di tingkat tapak dan kelompok sasaran sebagai titik masuk analisis, dengan asumsi bahwa kebijakan pada akhirnya dibentuk oleh keputusan-keputusan operasional sehari-hari (Hill & Hupe, 2014). Sintesis kedua tradisi melahirkan berbagai kerangka kontingensi yang mengaitkan strategi implementasi dengan karakter kebijakan dan konteksnya.

Dalam perspektif kontemporer, implementasi tidak lagi dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai proses tata kelola yang melibatkan jejaring aktor pemerintah dan nonpemerintah, negosiasi makna kebijakan, serta pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan (Hudson, Hunter & Peckham, 2019). Penelitian ini memandang implementasi dari sisi kapabilitas pemerintah, yakni sejauh mana pemerintah kota memiliki kapasitas kebijakan untuk menjalankan fungsi-fungsi implementasi secara efektif.

2. Konsep dan Dimensi Kapasitas Kebijakan

Kapasitas kebijakan merupakan konsep multidimensi yang menjembatani studi implementasi dan studi tata kelola. Kerangka Wu, Ramesh, & Howlett (2015) mengidentifikasi tiga kompetensi utama: kapasitas analitis, yaitu kemampuan memproduksi dan memanfaatkan pengetahuan dalam proses kebijakan, mencakup ketersediaan data, kemampuan analisis, dan pemanfaatan hasil evaluasi; kapasitas operasional, yaitu kemampuan memobilisasi sumber daya dan menjalankan tindakan administratif, mencakup pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi antarorganisasi; serta kapasitas politik, yaitu kemampuan memperoleh dan mempertahankan dukungan politik serta legitimasi publik atas kebijakan.

Kerangka Wu, Ramesh & Howlett (2015) selanjutnya menyilangkan tiga jenis kompetensi tersebut dengan tiga level sumber daya: level individu (keterampilan aparatur), level organisasi (sistem, prosedur, dan sumber daya kelembagaan), dan level sistem (dukungan politik, kepercayaan publik, dan jejaring antarlembaga), sehingga menghasilkan sembilan sel kapasitas. Ramesh, Howlett, dan Saguin (2016) kemudian mengembangkan instrumen survei untuk mengukur kapasitas pada level individu, yang menjadi rujukan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini. Mukherjee, Coban & Bali (2021) menegaskan bahwa kapasitas kebijakan

merupakan prasyarat desain kebijakan yang efektif: tanpa kapasitas yang memadai, desain sebaik apa pun akan gagal diterjemahkan menjadi hasil.

Perlu ditegaskan bahwa ketiga dimensi kapasitas bersifat saling melengkapi dan tidak saling menggantikan. Kapasitas analitis tanpa kapasitas operasional menghasilkan kebijakan yang cerdas di atas kertas namun mandek dalam eksekusi; kapasitas operasional tanpa kapasitas politik rentan kehilangan dukungan anggaran dan legitimasi; sementara kapasitas politik tanpa kedua kapasitas lainnya melahirkan kebijakan simbolik. Karena itu pengukuran ketiganya secara serentak, sebagaimana dilakukan penelitian ini, diperlukan untuk mendiagnosis konfigurasi kapasitas suatu pemerintah daerah secara utuh.

3. Kapasitas Kebijakan dan Keberhasilan Implementasi

Studi-studi terdahulu menunjukkan hubungan positif antara kapasitas kebijakan dan kinerja implementasi kebijakan lingkungan. Howlett dan Ramesh (2016) menemukan bahwa kegagalan tata kelola umumnya bersumber dari ketidakseimbangan kapasitas, misalnya kapasitas politik yang tinggi tanpa disertai kapasitas operasional. Pada sektor persampahan, kapasitas operasional kerap menjadi kendala utama pemerintah daerah di negara berkembang karena keterbatasan anggaran, kelembagaan pengelola yang belum profesional, dan lemahnya koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah kelurahan serta komunitas.

Keberhasilan implementasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai derajat ketercapaian tujuan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, diukur melalui indikator ketercapaian target kinerja Jakstrada, kualitas layanan pengangkutan, cakupan program pengurangan di sumber, dan keberlanjutan pembiayaan.

Interaksi antarlevel kapasitas patut digarisbawahi: kapasitas individu (keterampilan aparatur) hanya efektif bila diwadahi kapasitas organisasi (sistem, data, dan prosedur), dan kapasitas organisasi hanya berdaya bila ditopang kapasitas sistem (dukungan politik, kepercayaan publik, jejaring antarlembaga). Analisis kebijakan yang terampil tidak akan produktif tanpa basis data timbulan yang memadai; sistem data yang baik tidak akan digunakan tanpa budaya organisasi yang menghargai bukti; dan organisasi yang mumpuni tetap lumpuh bila keputusan politik anggaran tidak berpihak. Penelitian ini mengukur kapasitas pada level individu-organisasi melalui persepsi aparatur, dengan kesadaran bahwa temuan perlu dibaca dalam bingkai interaksi antarlevel tersebut.

Literatur pengembangan kapasitas juga mengingatkan bahwa penguatan kapasitas bukan semata penambahan input (pelatihan, anggaran, personel), melainkan perubahan cara kerja: pelembagaan penggunaan data dalam keputusan, rutinisasi evaluasi yang berorientasi perbaikan, dan pembangunan mekanisme koordinasi yang tidak bergantung pada figur tertentu. Tanpa perubahan cara kerja, tambahan input berisiko terserap tanpa meningkatkan kemampuan kebijakan yang sesungguhnya, fenomena yang dikenal sebagai *capacity building* yang bersifat seremonial.

4. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Kota Malang

Kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang membagi kegiatan pengelolaan menjadi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 kemudian menetapkan target nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025, yang wajib dijabarkan setiap kabupaten/kota ke dalam Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada).

Pada level Kota Malang, penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya, dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah penanggung jawab. Instrumen kebijakan yang dikembangkan meliputi layanan pengangkutan, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), pembinaan bank sampah, edukasi pemilahan di sumber, serta modernisasi TPA Supit Urang dengan sistem sanitary landfill. Pencapaian target Jakstrada pada gilirannya menuntut ketiga jenis kapasitas sekaligus: kapasitas analitis untuk memetakan timbulan dan mengevaluasi program, kapasitas operasional untuk membiayai dan mengoordinasikan layanan, serta kapasitas politik untuk memelihara dukungan kepala daerah, DPRD, dan warga.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah perkotaan berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan serta tujuan 12 mengenai pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Keterkaitan tersebut menempatkan kinerja implementasi kebijakan persampahan bukan sekadar urusan kebersihan kota, melainkan indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan, sehingga kajian empiris atas faktor-faktor penentunya memiliki nilai strategis bagi agenda pembangunan daerah.

5. Pengembangan Hipotesis

Kapasitas analitis memungkinkan pemerintah memetakan persoalan, menargetkan intervensi, dan belajar dari evaluasi, sehingga keputusan alokatif menjadi berbasis bukti (Wu, Ramesh & Howlett, 2015; Mukherjee, Coban & Bali, 2021). Ketersediaan data timbulan dan pemanfaatan evaluasi diduga meningkatkan ketepatan program pengurangan dan penanganan sampah. Atas dasar itu diajukan H1: kapasitas analitis berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi.

Kapasitas operasional menyediakan kemampuan eksekusi berupa pembiayaan, kelembagaan, personel, dan koordinasi antarorganisasi; defisit pada dimensi ini merupakan titik rawan kegagalan tata kelola (Howlett & Ramesh, 2016). Atas dasar itu diajukan H2: kapasitas operasional berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi.

Kapasitas politik menjamin keberlanjutan dukungan pimpinan daerah, legislatif, dan publik atas kebijakan, yang menentukan keberpihakan alokasi sumber daya dan legitimasi tindakan pemerintah (Wu, Ramesh & Howlett, 2015). Atas dasar itu diajukan H3: kapasitas politik berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi, serta H4: ketiga dimensi kapasitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lain melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud menguji proposisi teoretis yang telah mapan dengan data empiris yang terukur, sehingga temuan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan direplikasi (Creswell & Creswell, 2018). Unit analisis penelitian adalah aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan persampahan, dengan asumsi bahwa persepsi aparatur atas kapasitas merupakan proksi yang sah bagi kapasitas kebijakan level individu dan organisasi (Ramesh, Howlett & Saguin, 2016).

Populasi penelitian adalah aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebanyak 152 orang. Ukuran sampel sebesar 110 responden ditentukan dengan rumus Slovin pada margin kesalahan 5% dan dialokasikan

secara proporsional menurut unit kerja dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, sebagaimana Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian

No	Unit/strata	Populasi	Sampel
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	44	32
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	9
3	Kecamatan (5 kecamatan)	30	22
4	Kelurahan pelaksana program	66	47
Jumlah		152	110

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah, laporan kinerja perangkat daerah, data timbulan dan capaian pengurangan sampah pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data sekunder tidak diolah secara statistik, melainkan digunakan sebagai bahan triangulasi dalam menginterpretasikan temuan kuantitatif pada bagian pembahasan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban pada setiap variabel, dengan kategorisasi skor rata-rata ke dalam lima jenjang interval (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi). Kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Ketiga, analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian (Ghozali, 2018).

Model regresi yang diestimasi dirumuskan sebagai $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, dengan a sebagai konstanta, b sebagai koefisien regresi, dan e sebagai error term. Sebelum estimasi model, dilakukan pula analisis korelasi Pearson untuk memetakan kekuatan dan arah hubungan antarvariabel sebagai pemeriksaan awal atas konsistensi data dengan hipotesis. Seluruh pengolahan data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26 dengan taraf signifikansi 5%.

Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan uji t , yakni membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta nilai signifikansi dengan taraf 0,05: hipotesis diterima apabila t hitung melebihi t tabel (atau signifikansi di bawah 0,05) dengan arah koefisien sesuai hipotesis. Pengujian simultan dilakukan dengan uji F untuk menilai apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun kekuatan model diukur dengan koefisien determinasi Adjusted R Square, yang menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh model; penggunaan nilai adjusted dimaksudkan untuk mengoreksi bias penambahan jumlah prediktor (Ghozali, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Tabel 2 menyajikan karakteristik responden.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	63	57,3%
	Perempuan	47	42,7%
Usia	< 30 tahun	12	10,9%
	30 - 40 tahun	38	34,5%
	41 - 50 tahun	41	37,3%
	> 50 tahun	19	17,3%

Pendidikan	Diploma	13	11,8%
	Sarjana (S1)	74	67,3%
	Magister (S2)	23	20,9%
Masa Kerja	< 5 tahun	16	14,5%
	5 - 10 tahun	47	42,7%
	> 10 tahun	47	42,7%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Komposisi jenis kelamin relatif berimbang dengan dominasi laki-laki (57,3%). Kelompok usia terbesar adalah 41-50 tahun dan mayoritas responden berpendidikan sarjana (67,3%) hingga magister (20,9%), sejalan dengan fungsi perencanaan dan analisis yang menjadi fokus pengukuran. Sebanyak 85,4% responden memiliki masa kerja lebih dari lima tahun pada urusan terkait.

Untuk memeriksa apakah jawaban responden berbeda secara sistematis antarkelompok, dilakukan uji beda one-way ANOVA atas skor variabel terikat menurut unit kerja (dinas, badan perencanaan, kecamatan, kelurahan).

Tabel 3. Hasil Uji Beda Skor Variabel Terikat Menurut Unit Kerja (Dinas, Badan Perencanaan, Kecamatan, Kelurahan)

Sumber variasi	F hitung	Sig.	Keterangan
Antarkelompok	1,37	0,255	Tidak berbeda signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan nilai F sebesar 1,37 dengan signifikansi 0,255 (> 0,05), yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antarkelompok. Temuan ini mengindikasikan homogenitas persepsi lintas kelompok responden sehingga penggabungan data seluruh responden dalam satu model analisis dapat dipertanggungjawabkan.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Kategorisasi skor rata-rata menggunakan interval lima jenjang: 1,00-1,80 sangat rendah; 1,81-2,60 rendah; 2,61-3,40 sedang; 3,41-4,20 tinggi; dan 4,21-5,00 sangat tinggi. Interval kategori diperoleh dari rentang skor maksimum dan minimum skala (5 dikurangi 1) dibagi lima jenjang kategori, menghasilkan lebar interval 0,80. Penyajian deskriptif berikut menampilkan skor rata-rata setiap indikator beserta kategorinya, dengan pembacaan yang diarahkan pada identifikasi indikator terkuat dan terlemah sebagai pintu masuk pembahasan.

Distribusi jawaban responden pada variabel kapasitas analitis disajikan dalam Tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Kapasitas Analitis

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Ketersediaan data timbulan dan komposisi	3,42	Tinggi
2	Kemampuan analisis kebijakan	3,55	Tinggi
3	Pemanfaatan hasil evaluasi	3,05	Sedang
Rata-Rata Variabel		3,34	Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2026

Skor rata-rata kapasitas analitis sebesar 3,34 (kategori sedang). Kelemahan utama terletak pada pemanfaatan hasil evaluasi dalam revisi program (3,05): evaluasi program persampahan cenderung berhenti sebagai laporan administratif tanpa umpan balik terhadap desain kegiatan tahun berikutnya.

Distribusi jawaban responden pada variabel kapasitas operasional disajikan dalam Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Kapasitas Operasional

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Kecukupan pembiayaan	2,91	Sedang
2	Kesiapan kelembagaan	3,27	Sedang
3	Kompetensi SDM	3,31	Sedang
4	Koordinasi antarorganisasi	3,23	Sedang
	Rata-rata variabel	3,18	Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Skor rata-rata kapasitas operasional sebesar 3,18 (kategori sedang) dan merupakan dimensi kapasitas terendah. Kecukupan pembiayaan operasional pengurangan sampah memperoleh skor terendah (2,91), diikuti persoalan koordinasi antarorganisasi yang belum terlembaga secara rutin.

Distribusi jawaban responden pada variabel kapasitas politik disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Kapasitas Politik

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Dukungan kepala daerah dan DPRD	3,78	Tinggi
2	Keterlibatan pemangku kepentingan	3,59	Tinggi
3	Legitimasi publik	3,61	Tinggi
	Rata-rata variabel	3,66	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Skor rata-rata kapasitas politik sebesar 3,66 (kategori tinggi) dan merupakan dimensi kapasitas tertinggi. Dukungan kepala daerah dan DPRD dipersepsikan kuat (3,78), tercermin dari masuknya agenda persampahan dalam dokumen perencanaan dan pernyataan komitmen publik pimpinan daerah.

Distribusi jawaban responden pada variabel keberhasilan implementasi disajikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Keberhasilan Implementasi

No	Indikator	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Ketercapaian target Jakstrada	3,18	Sedang
2	Kualitas layanan	3,42	Tinggi
3	Cakupan pengurangan di sumber	3,25	Sedang
4	Keberlanjutan pembiayaan	3,31	Sedang
	Rata-rata variabel	3,29	Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Skor rata-rata keberhasilan implementasi sebesar 3,29 (kategori sedang). Ketercapaian target Jakstrada merupakan indikator terendah (3,18), konsisten dengan data capaian pengurangan sampah yang belum memenuhi target 30%, sementara kualitas layanan pengangkutan dinilai relatif lebih baik (3,42).

Rekapitulasi skor seluruh variabel disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Skor Rata-Rata dan Kategori Variabel Penelitian

No	Variabel	Skor Rata-Rata	Kategori
1	Kapasitas analitis (X1)	3,34	Sedang
2	Kapasitas operasional (X2)	3,18	Sedang
3	Kapasitas politik (X3)	3,66	Tinggi
4	Keberhasilan implementasi (Y)	3,29	Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Profil kapasitas memperlihatkan ketimpangan yang khas: kapasitas politik tinggi namun kapasitas analitis dan operasional tertinggal pada kategori sedang, konfigurasi yang oleh Howlett & Ramesh (2016) diidentifikasi sebagai rawan kegagalan tata kelola.

3. Uji Asumsi Klasik

Ringkasan uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi	Indikator	Nilai	Keterangan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov Sig.	0,200	Normal
Multikolinearitas	VIF X1; X2; X3	1,63; 1,87; 1,52	Bebas multikolinearitas
Heteroskedastisitas	Sig. Glejser X1; X2; X3	0,356; 0,283; 0,472	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Residual berdistribusi normal (Kolmogorov-Smirnov sig. 0,200), seluruh variabel bebas memiliki VIF antara 1,52 hingga 1,87 (< 10) dengan tolerance di atas 0,10 sehingga bebas multikolinearitas, dan uji Glejser menunjukkan seluruh signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Model layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 10. Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian

Variabel	X1	X2	X3	Y
Kapasitas analitis (X1)	1,000	0,563**	0,498**	0,591**
Kapasitas operasional (X2)	0,563**	1,000	0,521**	0,682**
Kapasitas politik (X3)	0,498**	0,521**	1,000	0,547**
Keberhasilan implementasi (Y)	0,591**	0,682**	0,547**	1,000

**signifikan pada taraf 1%

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Matriks korelasi Pearson pada Tabel 10 menunjukkan seluruh dimensi kapasitas berkorelasi positif signifikan dengan keberhasilan implementasi, dengan korelasi tertinggi pada kapasitas operasional ($r = 0,682$). Korelasi antarprediktor berada pada rentang moderat (0,498 hingga 0,563), jauh di bawah ambang kolinearitas, sehingga ketiga dimensi layak diestimasi dalam satu model.

4. Analisis Korelasi Antarvariabel

Sebagai pemeriksaan awal sebelum estimasi model regresi, dilakukan analisis korelasi Pearson antarvariabel yang hasilnya disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Matriks Korelasi Pearson Antarvariabel Penelitian

Pasangan variabel	Koefisien (r)	Sig. (2-tailed)	Interpretasi
Kapasitas analitis (X1) - Keberhasilan (Y)	0,58	0,000	Positif, sedang
Kapasitas operasional (X2) - Keberhasilan (Y)	0,70	0,000	Positif, kuat
Kapasitas politik (X3) - Keberhasilan (Y)	0,52	0,000	Positif, sedang
X1 - X2	0,57	0,000	Positif, sedang
X1 - X3	0,49	0,000	Positif, sedang
X2 - X3	0,53	0,000	Positif, sedang

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Ketiga dimensi kapasitas berkorelasi positif dengan keberhasilan implementasi, dengan korelasi terkuat pada kapasitas operasional. Seluruh koefisien korelasi signifikan pada taraf 1%, dan tidak ada korelasi antarvariabel bebas yang melampaui 0,80, sehingga tidak terdapat indikasi awal multikolinearitas yang serius.

5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis Regresi Linier Berganda disajikan dalam tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	5,927	3,102	0,002	-
Kapasitas analitis (X1)	0,268	3,415	0,001	H1 diterima
Kapasitas operasional (X2)	0,401	5,637	0,000	H2 diterima
Kapasitas politik (X3)	0,229	2,984	0,004	H3 diterima
F hitung = 58,671; Sig. F = 0,000				H4 diterima
Adjusted R Square = 0,613				

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Ketiga dimensi kapasitas kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi, dengan kapasitas operasional sebagai prediktor terkuat ($B = 0,401$), disusul kapasitas analitis ($B = 0,268$) dan kapasitas politik ($B = 0,229$). Secara simultan model menjelaskan 61,3% variasi keberhasilan implementasi. Dominasi kapasitas operasional konsisten dengan argumen Howlett dan Ramesh (2016) bahwa defisit kapasitas administratif merupakan titik paling rawan dalam tata kelola sektor publik: dukungan politik yang relatif tinggi di Kota Malang belum diimbangi kecukupan pembiayaan dan koordinasi pelaksanaan yang memadai.

Rekapitulasi keputusan pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 13. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kapasitas analitis berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi	Diterima
H2	Kapasitas operasional berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi	Diterima
H3	Kapasitas politik berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan implementasi	Diterima
H4	Ketiga dimensi kapasitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi	Diterima

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Keempat hipotesis diterima, mengonfirmasi bahwa kerangka kapasitas kebijakan memiliki daya jelas yang kuat atas variasi keberhasilan implementasi kebijakan persampahan. Pengujian parsial menunjukkan kapasitas analitis memiliki t hitung 3,415 yang melampaui t tabel 1,983 dengan signifikansi 0,001 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima: peningkatan kapasitas analitis berasosiasi dengan peningkatan keberhasilan implementasi dengan koefisien 0,268. Kapasitas operasional memiliki t hitung 5,637 yang melampaui t tabel 1,983 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H2 diterima dengan koefisien terbesar dalam model (0,401). Adapun kapasitas politik memiliki t hitung 2,984 yang melampaui t tabel 1,983 dengan signifikansi 0,004 ($< 0,05$), sehingga H3 juga diterima dengan koefisien 0,229. Dengan demikian ketiga dimensi kapasitas terbukti berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi secara parsial.

Tabel 14. Hasil uji F (ANOVA)

Model	F hitung	F tabel	Sig.	Keterangan
Regresi	58,671	2,69	0,000	Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Pengujian simultan dilakukan melalui uji F dengan hasil sebagaimana Tabel 14. Nilai F hitung sebesar 58,671 jauh melampaui F tabel (2,69) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis pengaruh simultan diterima. Hal ini berarti model yang dibangun mampu menjelaskan variasi variabel terikat secara bermakna, dan variabel-variabel bebas yang dipilih berdasarkan teori terbukti relevan secara bersama-sama.

Koefisien determinasi model disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,790	0,624	0,613	2,542

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Nilai R sebesar 0,790 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh model, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai standard error of the estimate sebesar 2,542 mengindikasikan presisi prediksi model yang memadai.

Dominasi kapasitas operasional dalam model menegaskan bahwa persoalan utama implementasi kebijakan persampahan Kota Malang bersifat administratif-manajerial: pembiayaan operasional yang belum memadai, kelembagaan pengelola tingkat komunitas yang rapuh, dan koordinasi lintas perangkat daerah yang belum terlembaga. Kondisi ini konsisten dengan temuan Saguin, Ramesh & Howlett (2018) mengenai ketimpangan kapasitas di negara berkembang, di mana kapasitas politik dan retorika kebijakan kerap berlari lebih cepat daripada kapasitas administratif yang menopangnya. Temuan ini menjelaskan mengapa capaian pengurangan sampah Kota Malang belum memenuhi target Jakstrada meskipun komitmen politik telah dituangkan dalam dokumen kebijakan daerah. Kapasitas analitis yang moderat, terutama lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi, menyebabkan program persampahan cenderung repetitif dan kurang berbasis bukti. Sementara itu, kapasitas politik yang tinggi merupakan modal penting yang perlu dikonversi menjadi keputusan alokatif, misalnya peningkatan porsi anggaran pengurangan sampah di sumber dan penguatan kelembagaan pengelola sampah tingkat kelurahan.

Pengaruh signifikan kapasitas analitis menunjukkan bahwa ketersediaan data dan pemanfaatan evaluasi bukan pelengkap administratif, melainkan penentu kualitas keputusan alokatif: unit kerja yang memiliki data timbulan yang baik terbukti lebih mampu menargetkan intervensi pengurangan sampah pada kantong-kantong timbulan terbesar. Sebaliknya, lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi menyebabkan pengulangan program yang tidak efektif dari tahun ke tahun, fenomena yang oleh literatur disebut sebagai kegagalan pembelajaran kebijakan.

Kapasitas politik yang tinggi merupakan modal yang belum sepenuhnya dikonversi. Dukungan pimpinan daerah baru sampai pada pernyataan komitmen dan pengesahan dokumen kebijakan, belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam keputusan alokatif yang berpihak pada pengurangan sampah di sumber. Temuan ini memperkuat proposisi Howlett dan Ramesh (2016) bahwa kapasitas yang tidak seimbang antar dimensi merupakan konfigurasi yang rawan: komitmen politik tanpa kapasitas operasional menghasilkan kebijakan yang kaya wacana namun miskin eksekusi. Temuan penelitian ini memperkuat garis argumen Howlett dan Ramesh (2016) mengenai defisit kapasitas sebagai titik rawan tata kelola, serta temuan Saguin, Ramesh, dan Howlett (2018) mengenai ketimpangan kapasitas antar dimensi pada birokrasi negara berkembang. Kontribusi pembeda penelitian ini adalah kuantifikasi bobot relatif ketiga dimensi pada satu sektor kebijakan yang sama, yang menunjukkan bahwa pada kebijakan persampahan pemerintah kota, kapasitas operasional merupakan pengungkit utama keberhasilan.

Terhadap literatur pengukuran kapasitas, penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen Ramesh, Howlett, dan Saguin (2016) dapat diadaptasi secara valid dan reliabel pada konteks pemerintah kota Indonesia dengan penyesuaian indikator sektoral. Adaptasi semacam ini membuka peluang pembangunan indeks kapasitas kebijakan daerah yang dapat dipantau antarwaktu, sebagai instrumen diagnostik bagi pembinaan pemerintahan daerah oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Pola temuan penelitian ini paralel dengan Saguin, Ramesh,

dan Howlett (2018) yang menemukan ketimpangan kapasitas antar dimensi pada aparatur negara berkembang, serta memperkuat proposisi Howlett dan Ramesh (2016) mengenai defisit kapasitas sebagai sumber kegagalan tata kelola. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan bukti kuantitatif pada level pemerintah kota di Indonesia bahwa kapasitas operasional merupakan dimensi paling menentukan sekaligus paling lemah, sehingga menawarkan dasar empiris bagi penentuan prioritas penguatan kapasitas yang selama ini lebih banyak didasarkan pada asumsi.

Temuan penelitian ini juga dapat dibaca melalui lensa anggaran. Belanja persampahan pemerintah kota pada umumnya terserap dominan untuk penanganan (pengangkutan dan pemrosesan akhir) yang hasilnya kasat mata, sementara pengurangan di sumber yang justru menentukan keberlanjutan sistem memperoleh porsi kecil. Struktur belanja demikian merupakan wujud konkret defisit kapasitas operasional yang terukur dalam penelitian ini: bukan karena dana tidak ada, melainkan karena arsitektur alokasi belum berpihak pada pencegahan. Rekomposisi belanja menuju pengurangan di sumber karenanya merupakan indikator paling jujur bagi keseriusan penguatan kapasitas. Lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi yang terekam pada kapasitas analitis juga menunjuk pada persoalan insentif kelembagaan: evaluasi disusun untuk memenuhi kewajiban pelaporan, bukan untuk memperbaiki program, sehingga temuan evaluasi jarang dibahas dalam forum perencanaan tahun berikutnya. Pelembagaan forum reviu program persampahan yang mempertemukan perencana, pelaksana, dan pengevaluasi sebelum siklus penganggaran merupakan intervensi berbiaya rendah yang berpotensi memperbaiki mata rantai pembelajaran kebijakan ini.

Pada dimensi kapasitas politik, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan dukungan lintas periode kepemimpinan. Kebijakan persampahan memerlukan napas panjang yang melampaui satu masa jabatan, sedangkan pergantian kepemimpinan kerap disertai pergeseran prioritas. Pengikatan komitmen ke dalam peraturan daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan kemitraan dengan aktor nonpemerintah yang berumur panjang (perguruan tinggi, asosiasi bank sampah, dunia usaha) merupakan strategi pelembagaan dukungan politik yang direkomendasikan literatur dan relevan bagi Kota Malang.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam membaca temuan penelitian ini. Pertama, seluruh variabel diukur melalui persepsi responden (*self-report*) dengan satu instrumen pada satu waktu, sehingga terdapat potensi common method bias; meskipun pengujian instrumen menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai serta pola jawaban menunjukkan variasi yang wajar antarindikator, kehati-hatian tetap diperlukan dalam menafsirkan besaran koefisien. Kedua, desain potong lintang membatasi kekuatan inferensi kausal: arah pengaruh yang diuji dilandaskan pada teori, namun hubungan timbal balik antarvariabel tidak dapat sepenuhnya disingkirkan. Ketiga, generalisasi temuan terbatas pada konteks implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang pada periode pengumpulan data; perbedaan struktur kelembagaan, kepemimpinan, dan karakter sosial masyarakat di daerah lain dapat menghasilkan pola hubungan yang berbeda. Keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi kegunaan temuan sebagai dasar kebijakan, tetapi menegaskan pentingnya replikasi dan perluasan desain pada penelitian selanjutnya sebagaimana disarankan pada bagian kesimpulan.

Secara metodologis, replikasi dengan desain longitudinal akan memperkuat inferensi kausal dan menangkap dinamika antarvariabel dari waktu ke waktu, sementara kombinasi data persepsi dengan indikator kinerja objektif akan menekan bias metode umum. Secara substantif, pengukuran kapasitas yang memisahkan level individu, organisasi, dan sistem, serta penelusuran mekanisme konversi kapasitas politik menjadi keputusan alokatif, merupakan agenda yang menjanjikan bagi literatur policy capacity. Perluasan cakupan ke beberapa kota dengan karakter berbeda juga akan memungkinkan pengujian peran faktor kontekstual yang dalam penelitian ini bersifat tetap.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang, baik secara parsial maupun simultan, dengan kontribusi model sebesar 61,3%. Kapasitas operasional merupakan prediktor terkuat sekaligus dimensi dengan skor terendah, sehingga menjadi prioritas utama penguatan, khususnya pada aspek pembiayaan dan koordinasi antarorganisasi.

Keterbatasan penelitian ini adalah pengukuran kapasitas yang bertumpu pada persepsi aparatur tanpa triangulasi data objektif anggaran dan kinerja, serta belum membedakan kapasitas pada level individu, organisasi, dan sistem secara terpisah. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan data persepsi dengan data sekunder kinerja Jakstrada, memperluas responden pada aktor nonpemerintah, dan menguji model pada beberapa kota untuk meningkatkan generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Andover: Cengage Learning.
- Hill, M. & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy*. London: Sage Publications.
- Howlett, M. & Ramesh, M. (2016). Achilles' heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures. *Regulation & Governance*, 10(4), 301-313.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Sistem informasi pengelolaan sampah nasional*. Diakses dari: <https://sipsn.menlhk.go.id>
- Mukherjee, I., Coban, M. K. & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: A review. *Policy Sciences*, 54, 243-268.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Ramesh, M., Howlett, M. & Saguin, K. (2016). Measuring individual-level analytical, managerial and political policy capacity: A survey instrument. *Lee Kuan Yew School of Public Policy Research Paper*, 16-07. Singapore: National University of Singapore.
- Saguin, K., Ramesh, M. & Howlett, M. (2018). Policy work and capacities in a developing country: Evidence from the Philippines. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 40(1), 1-22.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wu, X., Ramesh, M. & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34 (3-4), 165-171.